

POTRET DEMOKRASI PROVINSI JAWA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

POTRET DEMOKRASI PROVINSI JAWA BARAT 2018



RELIGION
MAJORITY RULE
HUMAN RIGHTS
POLITICAL INFRASTRUCTURE
PRESS
GOVERNMENT
LEGAL PROCESS
MINORITY RIGHTS
LEGAL EQUALITY
FREE ELECTIONS
RULE OF LAW
FUNDAMENTAL PROCESSES
COLLECTIVISM
DEMOCRACY
FAIR ELECTIONS
COMPROMISE
SPEECH
CONSTITUTION
REPRESENTATION
MULTI-PARTY
POLITICAL EXPRESSION
PROTECTION OF RIGHTS
CITIZEN PARTICIPATION
SOCIAL CONTRACT
PARTICIPATION
INTERNET DEMOCRACY

POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2018

ISBN : 978-602-5745-33-1
Katalog : 4601012.32
No. Publikasi : 32520.1910
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 33 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2018

Tim Penyusun

- Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ
- Penanggung Jawab Teknis : Ir. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si
- Penulis & Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST
- Penyunting/Editor : Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat
M. Jalaluddin, S.ST, M.Si
- Lay out/ Tata letak : Vira Wahyuningrum

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mencoba mengukur perkembangan demokrasi di tiap Provinsi. Setelah melakukan berbagai penyempurnaan, Bappenas dan Kemendagri kemudian menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009. Pada tahun 2010 dengan dibiayai oleh UNDP, akhirnya disepakati menjadi *benchmark* penyusunan IDI berikutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai koordinator pengumpulan data dalam penyusunan IDI. Pada tahun 2011, dilaksanakan kembali penghitungan IDI 2010 yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolkum bekerjasama dengan BPS, Kemendagri serta Bappenas dengan menggunakan sumber keuangan dalam negeri. Setiap tahunnya IDI disusun untuk melihat dinamika demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Barat menyusun publikasi tentang potret demokrasi dengan judul "Potret Demokrasi Provinsi Jawa Barat 2018".

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang akan berguna bagi perencanaan pembangunan politik di Jawa Barat serta menambah pemahaman tentang potret demokrasi di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2019

Kepala,



Ir. Dody Herlando, M.Econ

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
2. METODOLOGI	3
2.1 Aspek, Variabel dan Indikator IDI	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Tahapan Penghitungan IDI	8
3. POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2014 – 2018	10
3.1 Aspek Kebebasan Sipil	15
3.2 Aspek Hak-hak Politik.....	20
3.3 Aspek Lembaga Demokrasi	24
4. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia...	3
Tabel 2.2	Makna Nilai IDI	9
Tabel 3.1	Skor Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018	19
Tabel 3.2	Skor Indikator pada Aspek Hak-hak Politik IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018	23
Tabel 3.3	Skor Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Penghitungan IDI.....	9
Gambar 3.1	Peringkat IDI 2018 menurut Provinsi di Indonesia.....	11
Gambar 3.2	Nilai IDI Jawa Barat dibandingkan IDI Nasional Tahun 2014 – 2018.....	12
Gambar 3.3	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2018.....	13
Gambar 3.4	Dinamika Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2014 – 2018.....	14
Gambar 3.5	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2018.....	16
Gambar 3.6	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2014 – 2018.....	17
Gambar 3.7	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Hak-hak Politik Tahun 2018.....	20
Gambar 3.8	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Hak-hak Politik Tahun 2014 – 2018.....	22
Gambar 3.9	Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2018.....	25
Gambar 3.10	Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2014 – 2018.....	26

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengukuran demokrasi sering menjadi pembicaraan hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir ini. Adanya gelombang demokratisasi global, telah menggeser era non demokratik berbagai negara di dunia menjadi rejim demokratik. Tidak terkecuali Indonesia yang juga mengalami transisi demokrasi besar-besaran yang sering disebut *big bang transition*. Indonesia dengan berbagai keragaman serta variasi antar daerah yang sangat lebar, menjadikan Indonesia harus mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Hal ini penting karena keberhasilan sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi itu berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan suatu alat ukur yang dapat menggambarkan perkembangan demokrasi di masing-masing daerah. Di samping itu dalam RPJPN 2005-2025 tertulis bahwa Bappenas membuat perencanaan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Karena itu, diperlukan suatu pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang dituangkan dalam bentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Keberadaan pengukuran seperti ini diharapkan bisa mendorong iklim demokrasi yang sehat dan berbagi pengalaman di antara pemerintah daerah serta menyediakan data yang terkait dengan ranah pembangunan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini dibuat untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Indeks ini dibangun dari 3 aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-hak Politik (*Political Right*) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Angka IDI disajikan pada level provinsi. Adapun untuk data nasional itu merupakan rata-rata angka IDI seluruh provinsi dengan penimbang tertentu. Angka IDI dibangun dari perilaku dua pilar utama yaitu pemerintah serta perilaku rakyat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah menggambarkan sejauh mana kondisi demokrasi di Provinsi Jawa Barat serta untuk memperoleh secara lengkap gambaran mengenai aspek, variabel dan indikator demokrasi penentu nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ketersediaan data ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam hal kehidupan berdemokrasi.

1.3. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, dalam publikasi ini akan disajikan dalam 4 bab yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Bab III akan mengulas Potret Demokrasi Provinsi Jawa Barat 2014 – 2018. Dan Bab IV adalah penutup.

2

METODOLOGI

2.1. Aspek, Variabel dan Indikator IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI dibangun dari tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek komponen IDI yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Seluruh aspek, variabel dan indikator yang membentuk IDI dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)		Sumber Data
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat		
1	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	<i>Review Surat Kabar</i>
2	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	<i>Review Surat Kabar</i>
II. Kebebasan berpendapat		
3	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	<i>Review Surat Kabar</i>
4	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	<i>Review Surat Kabar</i>
III. Kebebasan berkeyakinan		
5	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	<i>Review Dokumen</i>
6	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	<i>Review Surat Kabar</i>

7	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	<i>Review Surat Kabar</i>
IV. Kebebasan dari diskriminasi		
8	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Dokumen</i>
9	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Surat Kabar</i>
10	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	<i>Review Surat Kabar</i>
B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)		
V. Hak Memilih dan Dipilih		
11	Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	<i>Review Dokumen</i>
12	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	<i>Review Dokumen</i>
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	<i>Review Dokumen</i>
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	<i>Review Dokumen</i>
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi	<i>Review Dokumen</i>
VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan		
16	Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	<i>Review Surat Kabar</i>
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	<i>Review Surat Kabar</i>
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)		
VII. Pemilu yang bebas dan adil		
18	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	<i>Review Dokumen</i>
19	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	<i>Review Dokumen</i>
VIII. Peran DPRD		
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita	<i>Review Dokumen</i>

21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	<i>Review Dokumen</i>
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	<i>Review Dokumen</i>
IX. Peran Partai Politik		
23	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	<i>Review Surat Kabar dan Dokumen</i>
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	<i>Review Dokumen</i>
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)		
X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah		
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	<i>Review Dokumen</i>
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	<i>Review Dokumen</i>
XI. Peran Peradilan yang Independen		
27	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	<i>Review Surat Kabar</i>
28	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	<i>Review Surat Kabar</i>

2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan IDI, data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Dua metode tersebut dikombinasikan dengan rancangan tertentu sehingga data yang diperoleh dari metode yang satu akan melakukan validasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Untuk itu, ada empat tahapan pengumpulan data IDI yaitu Review Surat Kabar, Review Dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Seluruh tahapan pengumpulan data ini dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi.

Review Surat Kabar

Review surat kabar termasuk dalam pengumpulan data kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan variabel dan indikator penelitian melalui analisis isi (*content analysis*) bahan-bahan tertulis maupun simbolik. Pemilihan surat kabar yang digunakan berdasarkan :

- Oplah terbesar di masing-masing provinsi
- Independensi
- Kontinuitas

Adapun surat kabar yang dipakai dalam penyusunan IDI Jawa Barat tahun 2014 – 2018 adalah Harian Pikiran Rakyat.

Review Dokumen

Sama seperti review surat kabar, review dokumen juga termasuk rujukan data kuantitatif. Objek dari review dokumen ini berupa dokumen publik, yaitu dokumen yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di masing-masing provinsi. Dokumen-dokumen tersebut berupa :

- Peraturan Daerah yang masih berlaku
- Surat Keputusan Kepala Daerah dan atau DPRD
- Surat Edaran
- Surat Perintah
- Laporan
- Catatan
- Lainnya

Responden utama dari review dokumen ini adalah Sekretariat DPRD, Bappeda, Biro Hukum, KPU, Kesbangpol, Polda, PTUN dan Partai Politik.

Focus Group Discussion (FGD)

Ada tiga kata kunci yang digunakan dalam *Focus Group Discussion*, yaitu : diskusi (bukan wawancara), kelompok (bukan individu) dan terfokus (bukan bebas). Dengan demikian, secara harfiah, metode *Focus Group Discussion* (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Tiga alasan utama metode FGD digunakan dalam penyusunan IDI adalah : pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang telah berhasil dikumpulkan melalui review surat kabar dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review surat kabar dan dokumen.

Peserta yang diundang dalam FGD IDI ini adalah pemangku kepentingan dalam membangun demokrasi yaitu unsur pemerintahan, DPRD, akademisi, keamanan, media, buruh, mahasiswa dan partai politik. Peserta yang hadir dalam FGD IDI diharapkan adalah mereka yang mengetahui tentang kejadian-kejadian terkait demokrasi. FGD dilaksanakan selama dua hari, di mana hari pertama membahas tentang aspek kebebasan sipil, sedangkan hari kedua tentang aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.

Wawancara Mendalam

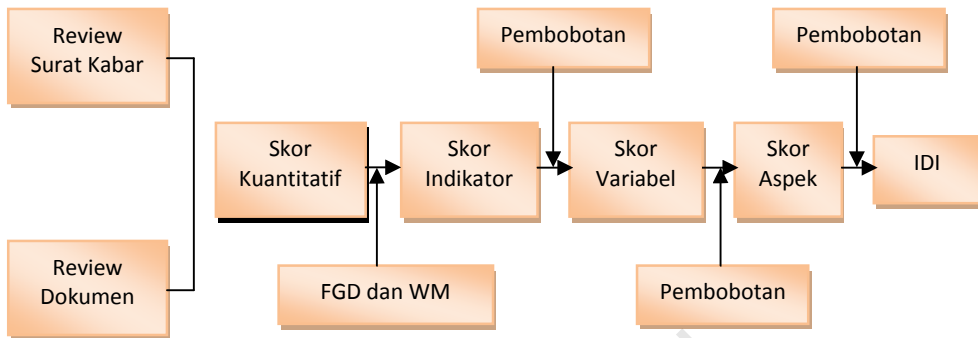
Wawancara mendalam dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Pada konteks penyusunan IDI, *in-depth interview* digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review surat kabar, dokumen maupun FGD. Wawancara mendalam diperankan sebagai pelengkap dari ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, wawancara mendalam dilaksanakan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Narasumber terpilih harus benar-benar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang indikator IDI. Lebih dari itu, wawancara mendalam juga berperan sebagai "filter" atau penyaring dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI.

2.3. Tahapan Penghitungan IDI

Penghitungan indeks untuk masing-masing indikator IDI ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yaitu review surat kabar dan review dokumen serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan wawancara mendalam). Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI yang pada akhirnya komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Secara singkat, operasionalisasi dari empat metode pengumpulan data dalam penyusunan IDI, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tahapan Penghitungan IDI



Skor indikator diperoleh dari Intensitas Indikator x Bobot Lokal Indikator x Bobot Lokal Variabel x Bobot Aspek. Pembobotan dilakukan oleh tim peneliti sedangkan intensitas diperoleh melalui AHP dengan skala yang berbeda-beda dengan range tertentu dan dikelompokkan dengan memberikan atribut nilai tertentu misalnya : 0 s/d 4.

Makna Nilai IDI

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi, digunakan skala 0-100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah atau nilai indeks = 0 secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 1).

Tabel 2.2. Makna Nilai IDI

Nilai IDI	Makna
< 60	kinerja demokrasi rendah
60 – 80	kinerja demokrasi sedang
> 80	kinerja demokrasi tinggi

3

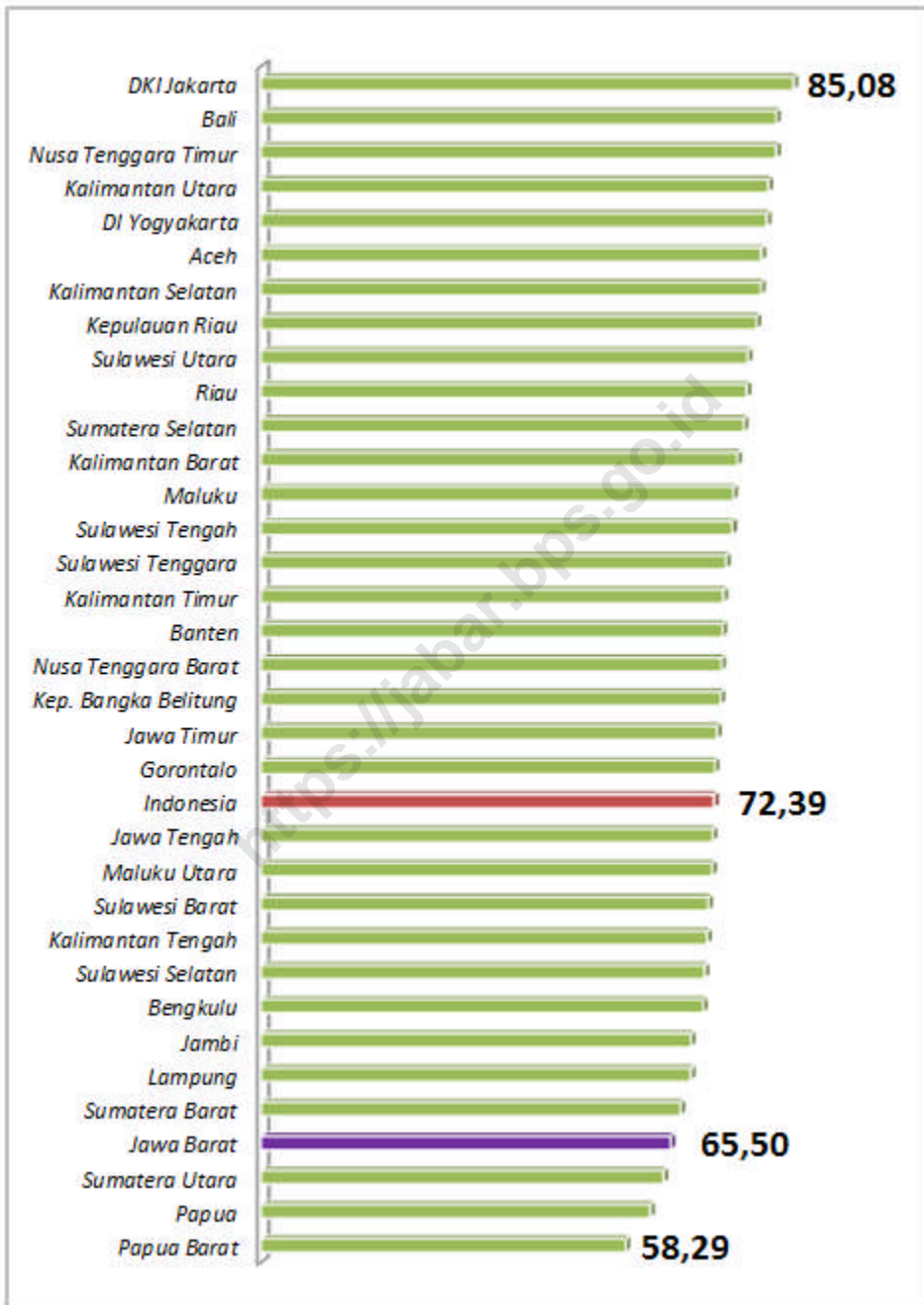
POTRET DEMOKRASI JAWA BARAT 2014 - 2018

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 merupakan Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun untuk ke-sepuluh kalinya sejak indeks serupa (IDI 2007) dihasilkan pada tahun 2008. Selanjutnya IDI 2009 disepakati menjadi *benchmark* penyusunan IDI berikutnya. Sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia. Keberadaan IDI sangat bermanfaat karena melalui IDI ini keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan dengan jelas.

Berdasarkan capaian IDI, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas pembangunan politik pada indikator tertentu yang mempunyai indeks rendah. Di sisi lain, pemerintah dapat memelihara kondisi demokrasi terkait dengan indikator yang mempunyai nilai indeks tinggi. Untuk kepentingan inilah IDI disusun guna membantu pemerintah khususnya pemerintah provinsi di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. Namun demikian, tingkat demokrasi di suatu daerah bukan hanya menggambarkan kinerja pemerintah daerah saja tetapi juga menggambarkan perilaku pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu manfaat IDI adalah dapat menunjukkan perkembangan tingkat demokrasi suatu wilayah dari tahun ke tahun. Kejadian-kejadian di suatu provinsi selama tahun tertentu dapat menaikkan atau menurunkan nilai IDI. Jadi nilai IDI tergantung dari skor masing-masing indikator selama kurun waktu satu tahun.

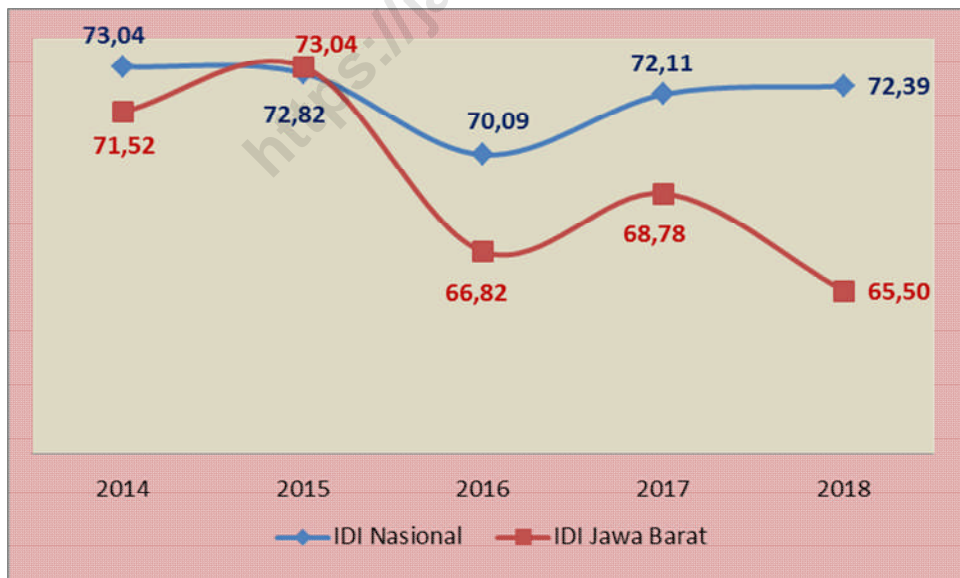
Gambar 3.1. Peringkat IDI 2018 menurut Provinsi di Indonesia



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa IDI Jawa Barat tahun 2018 sebesar 65,50 lebih rendah dari nilai IDI Nasional yang tercatat sebesar 72,39. Secara peringkat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, IDI Jawa Barat menempati posisi ke-31. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi yaitu dengan IDI sebesar 85,08 sementara peringkat terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 58,29. Terdapat 5 provinsi yang termasuk kategori kinerja demokrasi kategori baik yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta. Sementara itu provinsi-provinsi lainnya masuk dalam kategori kinerja demokrasi sedang, kecuali Provinsi Papua Barat yang masuk dalam kategori rendah. Namun secara umum, sebagian besar provinsi mengalami kenaikan nilai kinerja demokrasi jika dibandingkan keadaan tahun 2017.

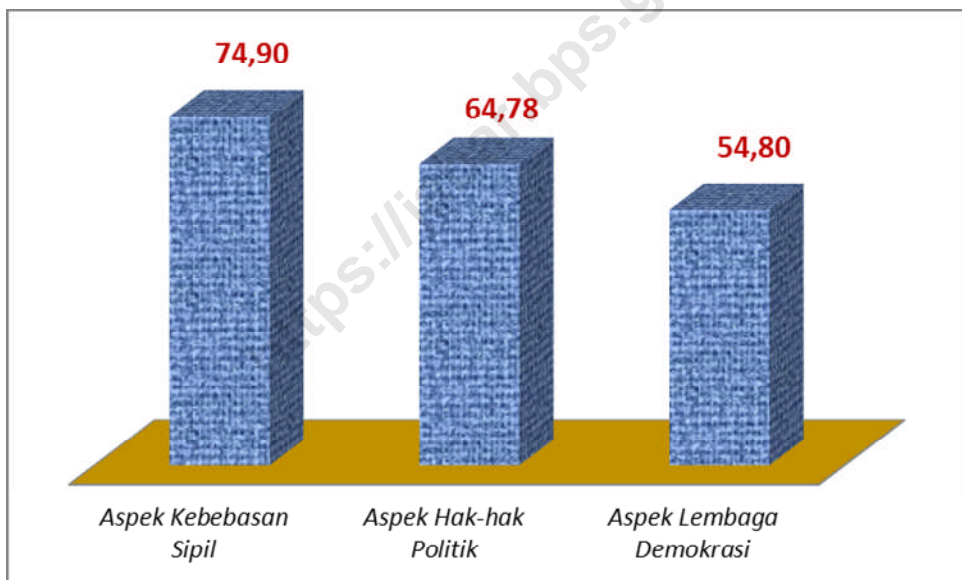
Gambar 3.2 Nilai IDI Jawa Barat dibandingkan IDI Nasional Tahun 2014 - 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Dinamika IDI Jawa Barat selama periode 2014 - 2018 arahnya hampir sama dengan IDI Nasional. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, IDI Jawa Barat berada di bawah angka IDI Nasional kecuali pada tahun 2015 yang nilainya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Perbedaan yang cukup jauh terjadi pada tahun 2018 dimana IDI Jawa Barat hanya 65,50 sementara itu IDI Nasional mencapai 72,39. Walaupun nilai IDI Jawa Barat terjadi fluktuasi, namun secara keseluruhan selama periode tersebut, kinerja demokrasi di Jawa Barat masih termasuk kategori sedang (Gambar 3.2).

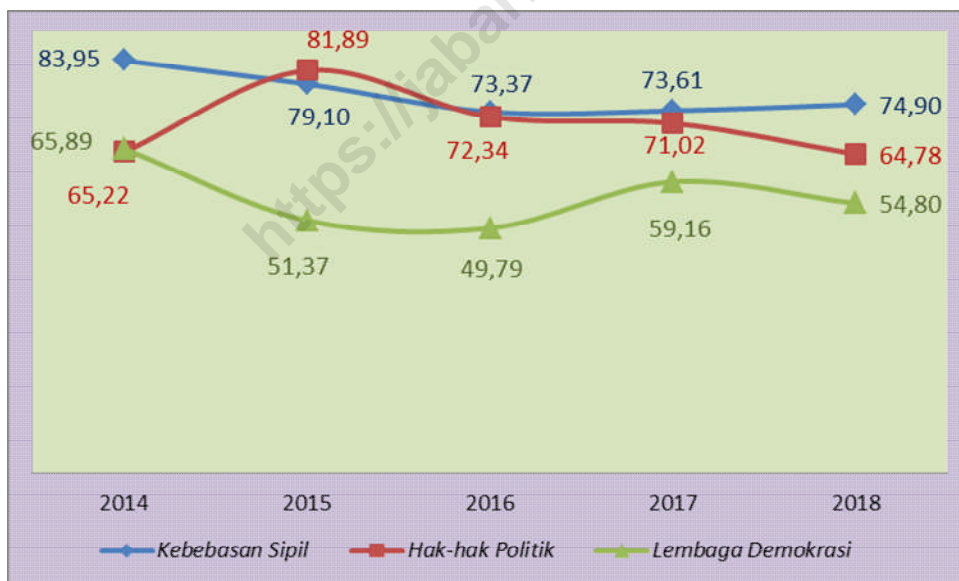
Gambar 3.3 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Jika dilihat menurut aspek yang membentuk IDI Jawa Barat tahun 2018, terlihat bahwa adanya kesenjangan di antara ketiga aspek tersebut (Gambar 3.3). Capaian aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik mempunyai kinerja sedang yaitu masing-masing sebesar 74,90 dan 64,78. Sedangkan untuk aspek Lembaga Demokrasi berada pada kinerja yang rendah dengan capaian 54,80. Dengan demikian, dapat dikatakan aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kondisi demokrasi di Jawa Barat tahun 2018. Dari ketiga aspek tersebut, aspek Lembaga Demokrasi memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja demokrasi di Jawa Barat.

Gambar 3.4 Dinamika Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Tahun 2014 – 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Gambar 3.4 menampilkan perkembangan ketiga aspek penyusun IDI, yaitu aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi selama kurun waktu 2014 - 2018. Selama periode tersebut, capaian indeks aspek Kebebasan Sipil cukup fluktuatif tetapi cenderung stabil. Sementara itu, capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan penurunan dan selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2017 dan menurun kembali pada tahun 2018. Adapun capaian indeks aspek Hak-hak Politik menunjukkan peningkatan sampai tahun 2015, dan setelah itu kondisinya menurun sampai tahun 2018.

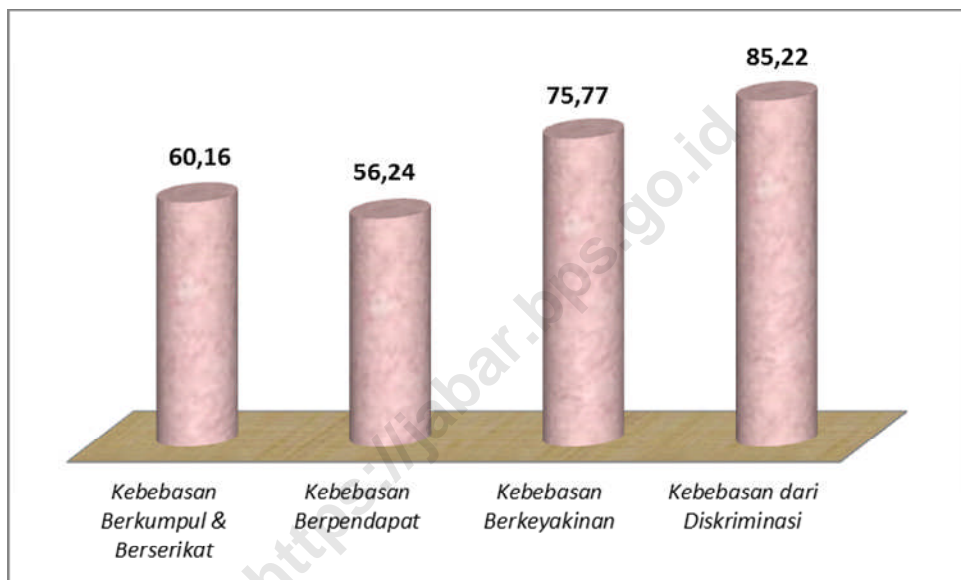
3.1 Aspek Kebebasan Sipil

Salah satu unsur penting dalam penegakan demokrasi adalah pemenuhan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak kebebasan sipil semua warga Negara. Kebebasan pasti memiliki batasan, karena tidak ada kebebasan yang absolut. Hak kebebasan seseorang dibatasi oleh hak kebebasan orang lain. Kebebasan hanya bermakna jika diiringi tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam demokrasi kebebasan seseorang tetap dibatasi oleh aturan yang disepakati bersama.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari agregasi indeks empat variabel yang dimiliki yaitu: (1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (2) Kebebasan Berpendapat, (3) Kebebasan Berkeyakinan dan (4) Kebebasan dari Diskriminasi. Pada tahun 2018, secara umum semua variabel mempunyai kinerja demokrasi yang cukup baik dalam aspek Kebebasan Sipil. Untuk variabel Kebebasan dari Diskriminasi sudah berada pada kinerja yang sangat baik yaitu 85,22. Variabel Kebebasan Berkumpul

dan Berserikat serta Berkeyakinan ada pada kinerja sedang dengan masing-masing mencapai 60,16 dan 75,77. Namun, pada variabel Kebebasan Berpendapat masih berada di kinerja yang rendah dengan 56,24. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2018

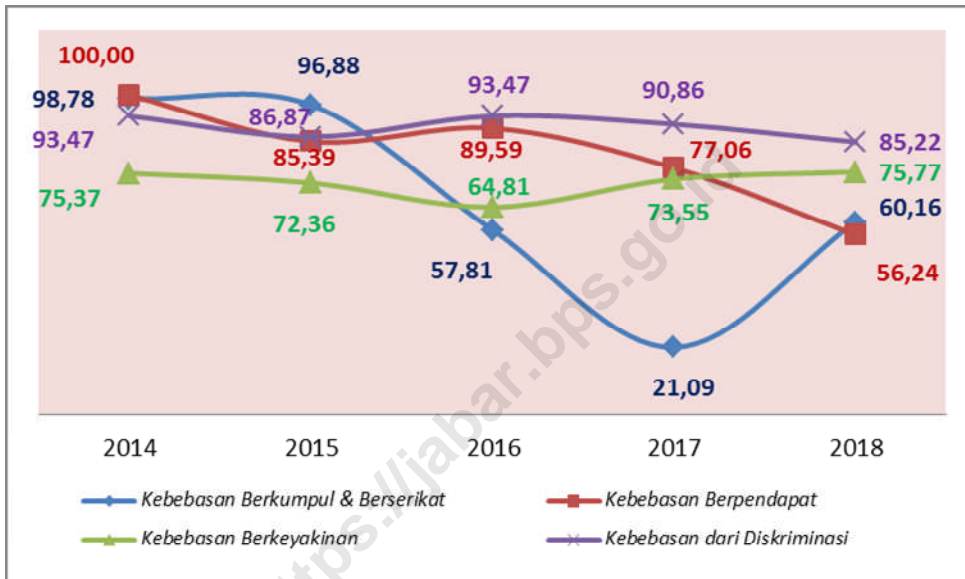


Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Tingginya capaian indeks Kebebasan dari Diskriminasi memperlihatkan bahwa pemerintah maupun masyarakat menjamin adanya kebebasan dari perlakuan diskriminasi. Namun demikian, masih ada kejadian yang mencederai demokrasi di Jawa Barat tahun 2018, yaitu adanya beberapa kejadian dimana aparat pemerintah ataupun masyarakat masih menghambat kebebasan berpendapat masyarakat lainnya. Di antaranya masih ditemukan adanya aparat yang melarang jurnalis untuk melakukan peliputan sampai terjadi pemecatan terhadap seorang jurnalis

dikarenakan ada permintaan dari Pejabat pemerintah dengan alasan tidak bisa diajak kerjasama. Selain itu masih adanya perusakan dan intimidasi di salah satu kantor media massa akibat pemberitaan yang dimuat.

Gambar 3.6 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2014 – 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Jika dilihat pada Gambar 3.6, perkembangan indeks Kebebasan Sipil dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan fluktuasi. Variabel yang menjadi penyebab turun atau naiknya indeks ini berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2015, terjadi penurunan indeks di semua variabel penyusun Aspek Kebebasan Sipil dibanding tahun 2014. Namun pada tahun 2016, terjadi peningkatan pada variabel Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan dari Diskriminasi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu masing-masing menjadi 89,59 dan 93,47.

Pada tahun 2017, hanya variabel Kebebasan Berkeyakinan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8 poin menjadi 73,55. Sedangkan 3 variabel lainnya mengalami penurunan pada tahun 2017. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat mengalami penurunan yang paling tajam pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 yakni sekitar 36 poin menjadi 21,09. Sedang variabel Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan dari Diskriminasi mengalami penurunan masing-masing sekitar 12 poin dan 2 poin menjadi 77,06 dan 90,86.

Sementara itu, pada tahun 2018, penurunan paling tajam dialami oleh variabel Kebebasan Berpendapat yaitu sekitar 20 poin jika dibandingkan tahun 2017. Selain itu, variabel Kebebasan dari Diskriminasi juga mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 85,22. Penurunan dua variabel ini disebabkan beberapa kejadian yang terjadi di tahun 2018 yang diawali dengan pelarangan sejumlah jurnalis untuk meliput suatu acara serta perusakan salah satu kantor media massa oleh sejumlah oknum masyarakat. Adapun dua variabel lainnya yaitu variabel Kebebasan Berkeyakinan dan Kebebasan Berkumpul Berserikat mengalami peningkatan masing-masing 2 poin dan 39 poin menjadi 75,77 dan 60,16. (Gambar 3.6).

**Tabel 3.1. Skor Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil
IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018**

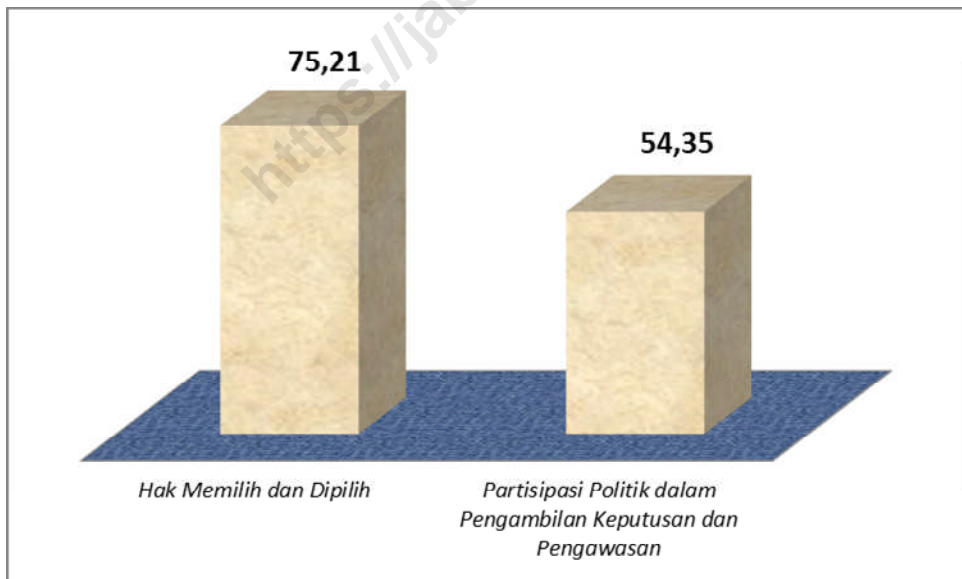
No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat						
1	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	62,50	12,50	62,50
2	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	75,00	25,00	81,25	43,75
Kebebasan Berpendapat						
3	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	87,50	87,50	62,50
4	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	12,50	100,00	25,00	25,00
Kebebasan Berkeyakinan						
5	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	65,22	60,87	60,87	73,91	69,57
6	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	81,25	53,13	100,00
7	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00	70,00	85,00	85,00
Kebebasan dari Diskriminasi						
8	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	83,33	66,67	83,33	83,33	83,33
9	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	90,63	100,00
10	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00

Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

3.2 Aspek Hak-hak Politik

Aspek Hak-hak Politik dibangun dari variabel hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Capaian indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih sebesar 75,21 menunjukkan bahwa kinerja demokrasi pada variabel ini masuk dalam katagori sedang. Variabel Hak Memilih dan Dipilih terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif 2014 seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), tingkat partisipasi pemilih serta adanya hambatan terhadap hak memilih dan dipilih. Di samping itu, keterwakilan perempuan di DPRD juga mempengaruhi capaian indeks variabel ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Hak-hak Politik Tahun 2018

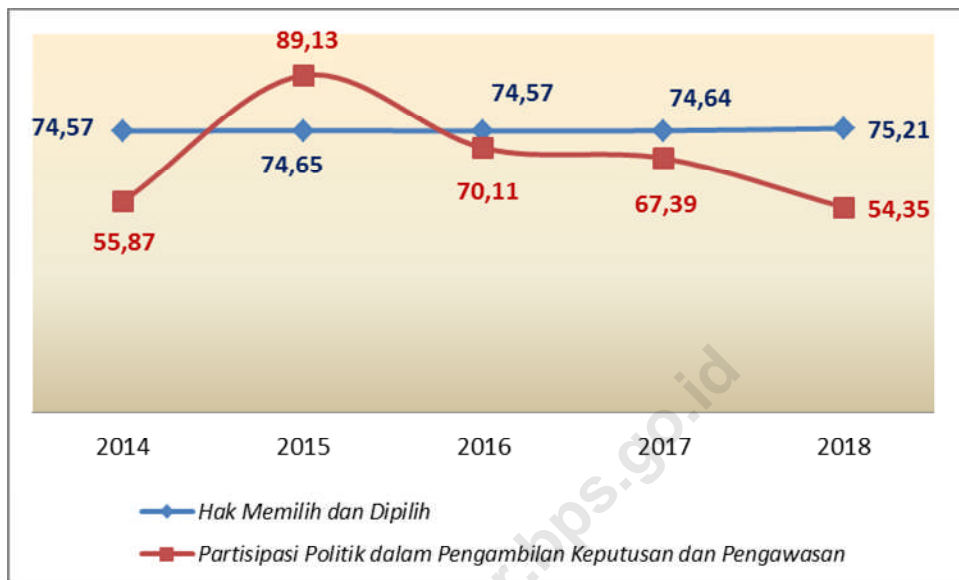


Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dibentuk dari 2 indikator yaitu jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan dan penyampaian pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2018, pengaduan yang disampaikan melalui surat kabar cukup banyak. Sebagaimana besar pengaduan adalah tentang infrastruktur. Tidak adanya pembatasan terhadap pengaduan masyarakat menunjukkan kondisi yang sangat demokratis. Namun di sisi lain, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat banyak yang berakhir dengan kekerasan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya nilai demokrasi pada variabel ini. Perpaduan nilai indeks dari 2 indikator pada variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan menyebabkan capaian indeks pada variabel ini mencapai 54,35.

Aspek Hak-hak Politik mempunyai dua variabel yakni variabel Hak Memilih dan Dipilih serta variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Gambar 3.8 memperlihatkan capaian indeks variabel yang membentuk Aspek Hak-hak Politik. Selama kurun waktu 2014 - 2018, capaian indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih relatif konstan. Sementara itu, capaian indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 dan mengalami penurunan terus sampai pada tahun 2018.

Gambar 3.8 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Hak-hak Politik Tahun 2014 – 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Indikator yang membentuk variabel hak memilih dan dipilih adalah jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat; jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih; kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT); persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*) dan persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selama periode 2014 – 2018, variabel Memilih dan Dipilih cenderung stabil (konstan). Sedangkan untuk variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan cukup fluktuatif. Periode 2014 – 2015 terjadi peningkatan nilai indeks variabel ini, namun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan. Penurunan variabel ini lebih kepada penurunan

indikator demonstrasi yang bersifat kekerasan yang merupakan salah satu pembentuk variabel ini yaitu dari 78,26 pada tahun 2015 menurun menjadi 40,22 pada tahun 2016 dan menurun lagi tahun 2017 menjadi 34,78 serta menurun tajam menjadi 8,70 pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya demonstrasi yang bersifat kekerasan yang terjadi Jawa Barat pada tahun 2018. Demontrasi yang bersifat kekerasan umumnya dipicu oleh ketidakpuasan akan infrastruktur serta ketidakpuasan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Skor Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hak Memilih dan Dipilih						
11	Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	74,36	74,36	74,36	74,36	74,36
12	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	78,15	78,15	78,15	78,15	78,15
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39
15	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	73,33	73,33	73,33	74,07	80,00
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan						
16	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	11,74	78,26	40,22	34,78	8,70
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

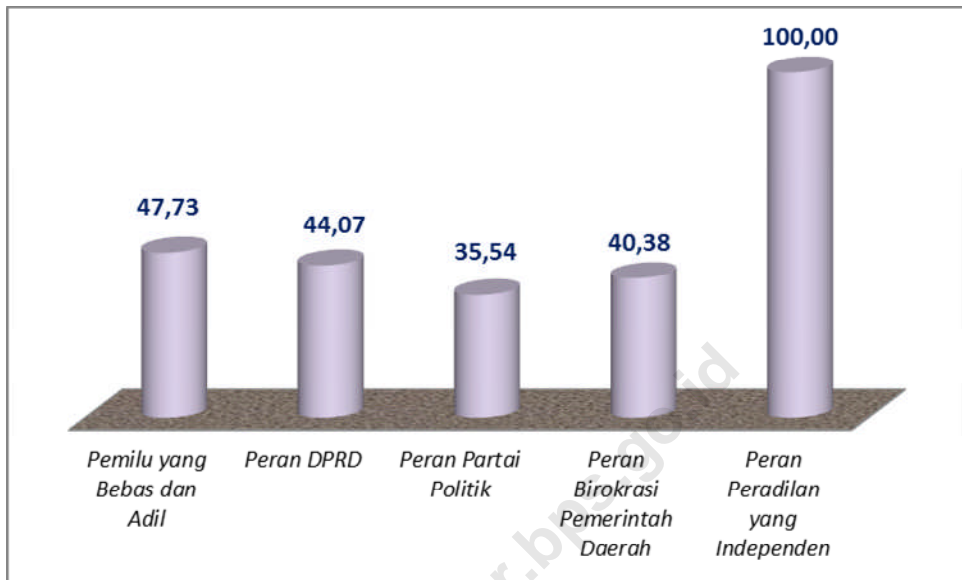
Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

3. 3 Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel yang tercakup dalam aspek lembaga demokrasi adalah pemerintah, DPRD, Partai Politik, birokrasi pemerintah daerah, lembaga yang terkait peradilan. Masing-masing lembaga berperan dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Peran Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pemilu terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. DPRD disorot dalam pelaksanaan 3 fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Partai Politik berperan dalam melaksanakan kaderisasi dan besaran keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Birokrasi pemerintah daerah fokus pada kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dan upaya penyediaan informasi APBD. Sementara itu peran lembaga yang terkait peradilan akan dilihat dari keputusan-keputusan yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Peran-peran masing-masing lembaga digambarkan dalam 5 variabel yaitu (1) Pemilu yang Bebas dan Adil; (2) Peran DPRD; (3) Peran Partai Politik; (4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; dan (5) Peran Peradilan yang Independen.

Hampir seluruh variabel dalam aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan kinerja demokrasi "rendah", hanya satu variabel yang menunjukkan kinerja demokrasi "baik" yaitu variabel Peran Peradilan yang Independen.

Gambar 3.9 Nilai IDI Jawa Barat menurut Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2018



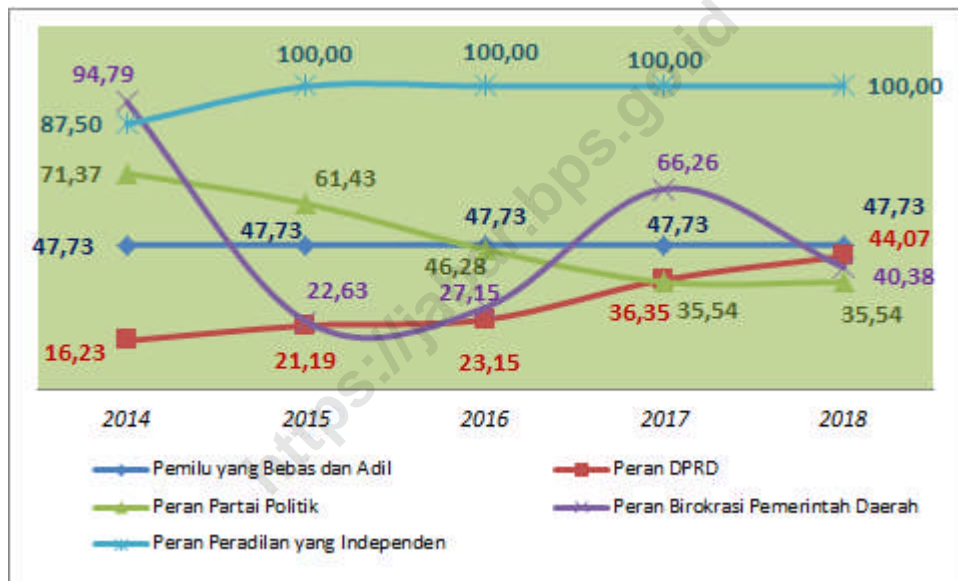
Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Dari Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa capaian indeks variabel Peran Peradilan yang Independen relatif tinggi yaitu mencapai 100,00. Hal ini menandakan bahwa peran peradilan yang independen di Jawa Barat sudah sangat baik. Hal ini bisa juga diartikan bahwa di Jawa Barat tidak ada keputusan hakim dan penghentian penyidikan oleh jaksa atau polisi yang bersifat kontroversial.

Adapun keempat variabel lainnya dalam aspek Lembaga Demokrasi yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah masih berada dalam kategori rendah. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 ternyata menyisakan berbagai masalah yang mengakibatkan nilai variabel ini rendah. Selain itu DPRD juga dirasakan belum menjalankan fungsinya secara optimal. Anggaran yang ditetapkan untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan masih belum

sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan oleh UU. Lemahnya fungsi legislasi yang dijalankan DPRD ditandai dengan masih sedikitnya perda inisiatif DPRD yang dihasilkan. Di samping itu, fungsi pengawasan pun belum dilaksanakan secara maksimal yang ditandai dengan belum optimalnya rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada lembaga eksekutif.

Gambar 3.10 Dinamika Nilai Indeks Variabel Jawa Barat dalam Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2014 – 2018



Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Gambar 3.10 memperlihatkan perkembangan capaian indeks pada variabel-variabel pembentuk Aspek Lembaga Demokrasi. Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dan variabel Peran Peradilan yang Independen menunjukkan pola yang konstan. Peran Partai Politik menunjukkan kinerja yang kurang bagus sejak tahun 2013 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai indeks variabel ini dari tahun ke tahun. Pelaksanaan kaderisasi merupakan salah satu wujud menciptakan iklim demokrasi yang

baik. Namun, pelaksanaan kegiatan kaderisasi oleh Partai masih sangat rendah. Ditengarai anggaran dari pemerintah umumnya digunakan untuk mobilisasi anggota pada saat menjelang Pilkada dan sistem pelaporan yang belum tertata dengan baik.

Untuk variabel Peran Peradilan yang Independen, nilainya cenderung stabil (konstan). Variabel Peran DPRD cukup mengalami hal yang positif. Ini ditandai dengan adanya peningkatan nilai variabel ini dari tahun ke tahun. Perubahan yang cukup fluktuatif terjadi di variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan ada pergantian indikator pada tahun 2015, sehingga mengakibatkan nilai indeks variabel ini turun tajam pada tahun 2015. Tahun 2016, variabel ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan kurang lebih sebesar 5 poin tetapi masih dalam kategori rendah. Dan pada tahun 2017, meningkat sangat signifikan sekitar 39 poin menjadi 66,26. Namun, tahun 2018 variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan kembali sekitar 25 poin menjadi 40,38.

Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, secara umum hampir semua variabel yang membentuk aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan kinerja yang meningkat kecuali Peran Partai Politik. Namun, pada tahun 2018, variabel yang mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan ada pada Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu menjadi 40,38 dibandingkan tahun 2017. Walaupun variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan yang paling tajam, tetapi variabel yang terendah capaiannya dalam aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 ada pada variabel Peran Partai Politik yaitu sebesar 35,54. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya capaian indeks Peran Partai Politik bisa jadi karena partai politik belum optimal dalam melakukan kaderisasi sehingga pada tahun 2018

nilainya berada di kategori rendah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada capaian indeks Peran Partai Politik.

Adapun variabel yang mengalami peningkatan terjadi pada variabel Peran DPRD. Pada tahun 2018, variabel Peran DPRD naik sekitar 7 poin menjadi 44,07. Ini merupakan hal yang menggembirakan. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan dalam alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, bertambahnya perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD dan bertambahnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Pada tahun 2018, fungsi anggaran pada Peran DPRD sudah mulai dioptimalkan sepenuhnya oleh DPRD. Capaian skor untuk alokasi anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan naik sekitar 4 poin dibandingkan tahun 2017 yakni mencapai 55,09. Begitu pula dengan fungsi legislasi dengan indikator jumlah perda inisiatif mengalami peningkatan di tahun 2018 yang mencapai 28,57. Adapun fungsi pengawasan juga menunjukkan hal yang positif ditandai dengan meningkatnya nilai indikator jumlah rekomendasi pada eksekutif yang mencapai 17,86 (Tabel 3.3).

**Tabel 3.3. Skor Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi
IDI Jawa Barat Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemilu Yang Bebas dan Adil						
18	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45
19	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peran DPRD						
20	Persentase alokasi anggaran pendidikan thd total APBD	43,18	25,21	29,47	50,77	55,09
	Persentase alokasi anggaran kesehatan thd total APBD					
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	16,67	15,38	14,29	28,57
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	10,71	10,71	7,14	3,57	17,86
Peran Partai Politik						
23	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	71,43	57,14	42,86	28,57	28,57
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	70,82	100,00	77,07	98,30	98,30
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah						
25	Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	98,68				
	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN		0,00	0,00	65,79	28,95
26	Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	90,91				
	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah		41,67	50,00	66,66	50,00
Peradilan yang Independen						
27	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil IDI 2018, BPS RI

Variabel Peran Peradilan yang independen menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan pengamatan dan data yang dihimpun, tidak ada kejadian penegakan hukum yang mencederai hati nurani masyarakat di Jawa Barat. Para penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik demi tegaknya demokrasi.

<https://jabar.bps.go.id>

4

PENUTUP

Kondisi demokrasi di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2014 – 2018 menunjukkan adanya fluktuasi. Untuk menciptakan suatu iklim demokrasi yang baik perlu ada kerjasama dan kesadaran akan tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Provinsi, Pihak Keamanan, DPRD, Partai Politik, LSM, Ormas, Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2018, capaian IDI Jawa Barat termasuk dalam kategori sedang dengan nilai indeks sebesar 65,50. Angka ini lebih rendah dari nilai IDI nasional yang tercatat sebesar 72,39.

Jika dilihat dari tiga aspek penyusun IDI di Jawa Barat pada tahun 2018, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi menunjukkan penurunan. Salah satu penyebab menurunnya aspek Hak-hak Politik dikarenakan jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan di Jawa Barat pada tahun 2018 bertambah. Di sisi lain, penurunan pada aspek Lembaga Demokrasi disebabkan bertambahnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN serta berkurangnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Namun di sisi lain, fungsi anggaran pendidikan dan kesehatan semakin optimal, perda inisiatif yang dihasilkan semakin bertambah serta makin optimalnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu tajam. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menjadi andil yang penting dalam peningkatan nilai aspek Kebebasan Sipil. Selain itu, tidak adanya tindakan/ Pernyataan pejabat dalam membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama maupun yang

diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya juga turut berkontribusi dalam menaikkan nilai aspek Kebebasan Sipil.

Memang menurunnya IDI tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 menunjukkan sensitivitas yang tinggi dari IDI terhadap naik turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Namun hal ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena hal tersebut menunjukkan adanya kualitas kinerja demokrasi di Jawa Barat.

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018. *Berita Resmi Statistik No.44/08/32/Th.XXI*, 1 Agustus 2019, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
- UNDP, 2009. *Menakar Demokrasi di Indonesia*, Juni 2011, Jakarta: UNDP, Indonesia
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Indeks Demokrasi Indonesia 2010, Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial: Sebuah Tantangan*, Oktober 2012, Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Kemenkopolkum, 2019. *Indeks Demokrasi Indonesia 2018, Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan*, September 2019, Jakarta: Kemenkopolkum

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No.43 Bandung 40124, Jawa Barat Telp:
022 7272595, 7201696 Fax: 022 7213572 Email:
bps3200@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5745-33-1

